

**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KERTANEGARA**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**( LKjIP )**



**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



---

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis 5 (Lima) tahun Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tujuan dan sasaran untuk pembangunan Tupoksi.

Adapun tujuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Dinas Pertanian dan Peternakan dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusif.
2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat tani dan ternak,
3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan, air dan teknologi dalam upaya optimalisasi produksi dan pelestarian agroekologi.
4. Meningkatkan Kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan petani
5. Meningkatkan hasil Produk Peternakan beserta ikutannya
6. Meningkatkan usaha budidaya ternak sesuai potensi lokal/wilayah.
7. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ternak Masyarakat

Dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan.
2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga tani melalui ketahanan pangan dan pemasaran hasil Pertanian dan Peternakan.

- 
3. Meningkatnya masyarakat tani dan ternak yang menggunakan paket teknologi dan terjadi peningkatan produksi Pertanian dan Peternakan.
  4. Meningkatnya produksi jagung melalui pengelolaan sumberdaya lahan dan air serta teknologi
  5. Meningkatnya pengelolaan pelestarian agroekologi melalui pengembangan komoditas spesifik lokal.
  6. Ketersediaan Pangan asal ternak;
  7. Penurunan Kasus penyakit Ternak dan hewan lainnya ;
  8. Optimalisasi penerapan teknologi tepat guna.
  9. Peningkatan pengaplikasian paket rekomendasi teknis budidaya dan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal sebanyak 90 % dari paket rekomendasi.

Dari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan tersebut hingga sejauh ini Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan berbagai upaya terobosan dalam hal realisasi pelaksanaan fisik Kegiatan sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 158,031,198,631 atau sebesar 92.34 %

Adapun kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pertanian antara lain :

1. Kurangnya dukungan Staf terhadap Komitmen Pimpinan
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki
3. Keterbatasan Benih Bermutu
4. Pengembalian fungsi kesuburan tanah yang masih rendah
5. Penggunaan pupuk dan pestisida belum optimal
6. Ketersediaan alat mesin pertanian belum cukup
7. Penanganan pengendalian serangan OPT masih minim
8. Pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal
9. Intensitas pembinaan dan monitoring kegiatan lapangan belum optimal
10. Pemetaan wilayah komoditas prioritas belum jelas

- 
11. Belum tersedia data dan informasi secara online
  12. Masih Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara.
  13. Sistem irigasi pertanian dan infrastruktur jalan usaha tani belum mampu mendukung untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil pertanian dan Peternakan secara memadai.
  14. Kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan Peternakan khususnya lahan sawah ke sektor penggunaan lain.
  15. Jaringan kerjasama kemitraan dan keterkaitan usaha di dalam internal sub sektor pertanian tanaman pangan & hortikultura maupun eksternal (dengan sub sektor/sector lainnya) masih lemah serta pemasaran produk masih terbatas di tingkat lokal.
  16. Semakin meningkatnya harapan & tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi menuju terwujudnya pelayanan bidang pertanian dan Peternakan yang mampu memuaskan masyarakat.
  17. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
  18. Perubahan Peraturan Pemerintah baik itu Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri.
  19. faktor-faktor pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

Berdasarkan beberapa kendala dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sistem pengairan berupa ketersediaan waduk, bendungan dan jaringan irigasi yang jumlahnya masih terbatas.

- 
2. Infrastruktur pendukung terutama jalan usaha tani dan akses jalan pedesaan ke lokasi pemasaran yang belum optimal.
  3. Sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian) yang masih kurang ketersediaanya di tingkat kelompok tani.
  4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal.
  5. Produktivitas padi sawah yang belum maksimal (masih bisa ditingkatkan lagi)
  6. Sumber daya manusia petani, penyuluh dan petugas terbatas kualitas dan kuantitasnya.
  7. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
  8. Kurangnya pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

Bertolak dari Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai diatas, maka Strategi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan aparatur yang berkompeten, PPL dan/atau tenaga ahli dalam mengawal dan memfasilitasi pengembangan budidaya tanaman dan peternakan.
2. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga litbang pertanian dan peternakan dalam rangka pemanfaatan, penerapan & pengembangan teknologi budidaya & pasca panen.
3. Melakukan kolaborasi dan sinergitas sumber daya dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, tingkat propinsi dan tingkat pusat dalam rangka perluasan areal persawahan dan peternakan.

- 
4. Mendorong dan memfasilitasi stake holders non pemerintah (petani,peternak dan dunia usaha) untuk secara swadaya melakukan pengembangan usaha pertanian dan peternakan.
  5. Melakukan kolaborasi dan sinergitas sumber daya dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, tingkat propinsi dan tingkat pusat serta stake holders lainnya dalam penyediaan bantuan alsintan.
  6. Mendorong dan memfasilitasi petani dan peternak untuk pengadaan sarana alsintan secara swadaya.
  7. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk memfasilitasi penciptaan kerjasama kemitraan di kalangan kelompo petani dan kelompok peternak / kelompok usaha pengolahan.
  8. Mendayagunakan sarana informasi & promosi untuk memfasilitasi penciptaan kerjasama pemasaran hasil pertanian dan peternakan.
  9. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam perencanaan, pelaksanaan & pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan.
  10. Mengikutsertakan PNS dalam berabagai pelatihan bidang perencanaan, administrasi, manajemen, keuangan & teknis pertanian dan peternakan.
  11. mengembangkan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rumusan Strategi diatas kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan sebagai berikut :

- 
- A. Kepastian ketersediaan lahan pangan berkelanjutan
  - C. Mengembangkan Pertanian berbasis Kawasan
  - D. Perbaikan sistem pertanian dari hulu sampai hilir
  - E. Dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura
  - F. Mengembangkan peternakan pola integrasi
  - G. Peningkatan pengamatan, penyidikan dan pengendalian PHM Strategis
  - H. Penerapan Teknologi Peternakan
  - I. Meningkatkan kualitas sumber daya petani
  - J. Mempermudah akses permodalan.
  - K. Hilirisasi produk pertanian

Kepala Dinas  
Pertanian dan Peternakan



Sutikno, SP, MM  
Pemula Tk.1  
NIP. 19650505 198709 1 003

---

## KATA PENGANTAR

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai kerangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel maka pelaksanaan pembangunan pertanian dan peternakan, tata kelola manajemen, dan system akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan.

Dengan tersusunnya LKjIP yang merupakan laporan tertulis pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, atas kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ini, kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur, dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan Peternakan kedepan serta menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan.

Tenggarong, Pebruari 2023  
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,  
  
Sutikno, SP, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650505 198709 1 003

---

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I       PENDAHULUAN .....	1
BAB II       PERENCANAAN KINERJA .....	6
BAB III       AKUNTABILITAS KINERJA	
1. CAPAIAN KINERJA .....	9
2. REALISASI ANGGARAN .....	20
BAB IV       PENUTUP .....	25
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>LAMPIRAN II : Indikator Kinerja Utama mengacu pada RPJMD 2021-2026</b>	
<b>LAMPIRAN III : Laporan Realisasi Keuangan</b>	
<b>LAMPIRAN IV : Rencana Kerja Tahunan</b>	
<b>LAMPIRAN V : Rencana Aksi Perangkat Daerah tahun 2022</b>	



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sektor pertanian dan Peternakan mencakup aspek Akuntabilitas yang didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan Ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan periode jangka menengah dan panjang ditambahkan Sektor peternakan, disamping sebagai sumber bahan makanan, bahan mentah bagi sektor industri, juga merupakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Tanpa mengabaikan sub sektor lainnya, sub sektor peternakan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Beberapa hal yang mendasari penyusunan LKjIP SKPD ini adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Sistematika Penyajian LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 secara garis besar sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**BAB I PENDAHULUAN**

*Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.*

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

*Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.*

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

*Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.*

**B. Realisasi Anggaran**

*Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.*

**BAB IV PENUTUP**

*Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.*

**Lampiran – lampiran**

## **B. Core Area**

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021 - 2026 menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :



NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian. 2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian 3. Meningkatnya Produksi Peternakan 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

### C. Issue Strategis

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan SKPD, telaah Visi – Misi – Kutai Kartanegara IDAMAN Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih; telaah Renstra K/L dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Timur dan telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
2. Pengawasan
3. Kurangnya dukungan anggaran
4. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki
5. Keterbatasan Benih Bermutu
6. Penggunaan pupuk dan pestisida belum optimal
7. Ketersediaan alat mesin pertanian belum cukup
8. Penanganan pengendalian serangan OPT masih minim

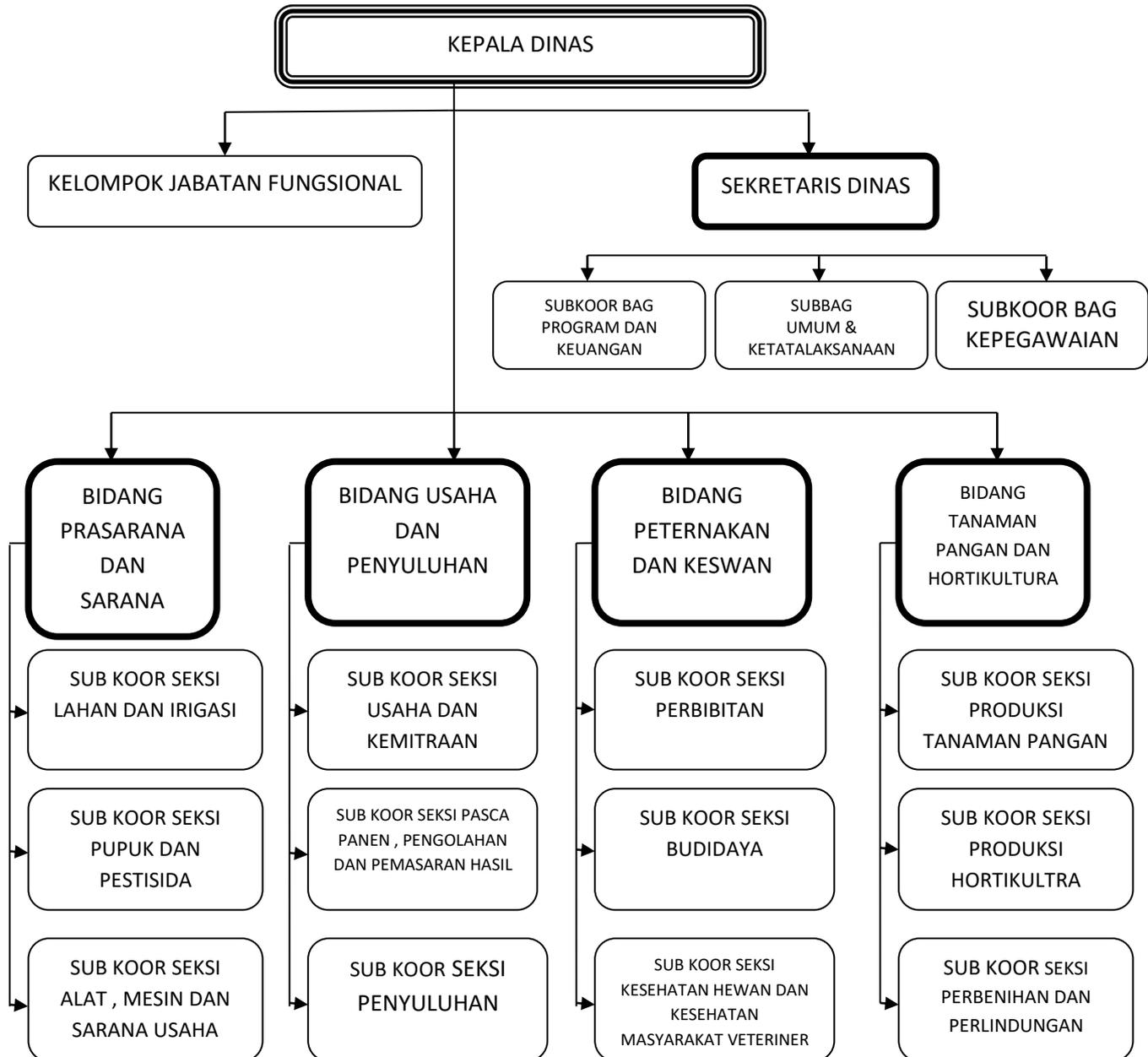


9. Pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal
10. Intensitas pembinaan dan monitoring kegiatan lapangan belum optimal
11. Pemetaan wilayah komoditas prioritas belum jelas
12. Belum tersedia data dan informasi secara online
13. Masih Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara.
14. Sistem irigasi pertanian dan infrastruktur jalan usaha tani belum mampu mendukung untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil pertanian TPH secara memadai.
15. Kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan Peternakan khususnya lahan sawah ke sektor penggunaan lain.
16. Jalinan kerjasama kemitraan dan keterkaitan usaha di dalam internal sub sektor pertanian dan Peternakan maupun eksternal (dengan sub sektor/sektor lainnya) masih lemah serta pemasaran produk masih terbatas di tingkat lokal.
17. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
18. faktor-faktor pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.



### D. Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN





## **II. PERENCANAAN KINERJA**

Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala PD Dinas Pertanian dan Peternakan selaku pembantu Bupati Kutai Kartanegara bidang pertanian dan Peternakan telah melakukan kontrak perjanjian kinerja dengan Bupati Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pembangunan tahun 2022.

Naskah perjanjian tentang pernyataan penetapan kinerja antara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dengan Bupati Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 terlampir dalam LKjIP ini.

Adapun lampiran perjanjian penetapan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		UTAMA		
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Padi	Ton/Ha	3,62
		Jagung	Ton/Ha	5,55
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Padi	Ton	117.596,4
		Jagung	Ton	29.401
		Palawija (Porang)	Ton	250
		Hortikultura	Ton	106.539
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Daging	Kg	14.036.000
		Telur	Kg	1.594.000
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	98,37
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	51
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100



		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
6	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu data Kukar	Persen	100
7	Membuat Inovasi dan /atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
8	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	100,000,000.00
9	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
10	Terealisasinya Output Kegiatan tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
		(Rp.)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67,537,027,136.00	APBD
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28,570,000,000.00	APBD
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	39,460,000,000.00	APBD
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	250,000,000.00	APBD
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500,000,000.00	APBD
6	Program Penyuluhan Pertanian	2,224,185,000.00	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>138,541,212,136.00</b>	<b>APBD</b>



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Adapun Pengukuran kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran :

##### 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pertanian dan Peternakan maka setiap aktivitas yang dilakukan harus dapat diukur yang dimulai dari input ( *masukan* ), output ( *keluaran* ), outcomes ( *hasil* ), benefits ( *manfaat* ) dan dampak ( *impacts* ) semua program yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat.

Setelah tersusun aktivitas / program kemudian digunakan data tersebut untuk merancang indikator kinerja yang terdiri dari indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak. Identifikasi dan penetapan indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan ( *Inputs* ) : mengukur jumlah sumberdaya seperti : dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat dianalisa alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran ( *Outputs* ) : digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisa sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator ini hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.



- c. Indikator Hasil ( *Outcomes* ) : menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para pembuat kebijaksanaan paling tertarik pada indikator ini dibandingkan dengan indikator lainnya. Namun informasi yang diperoleh untuk mengukur hasil seringkali tidak lengkap dan tidak mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan.
- d. Indikator Manfaat ( *Benefits* ): menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu dan tepat lokasi ).
- e. Indikator Dampak ( *Impacts* ): memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dan baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

## 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya berupa persentase hasil capaian, seperti berikut ini :

- a. Sasaran Strategis menyajikan sejumlah Sasaran yang ingin dicapai, yaitu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan memiliki indikator yang terukur.
- b. Indikator Kinerja menyajikan sejumlah alat ukur yang digunakan guna melihat sampai sejauh mana sasaran tersebut dicapai.



- c. Target menyajikan sejumlah perumusan angka akhir kinerja suatu sasaran yang ingin dicapai.
- d. Realisasi menyajikan realitas angka perolehan pada capaian akhir suatu kegiatan sebagai ukuran pencapaian target sasaran.
- e. Persentase menyajikan perbandingan antara Target yang ingin dicapai dengan realisasi yang telah dicapai berupa satuan persen. Sehingga hasil persentase mampu menggambarkan predikat capaian sebagai berikut :
  - 80 % – 100 % = baik
  - 50 % – 79 % = Cukup
  - < 50 % = Kurang

Dinas Pertanian dan Peternakan telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah disepakati antara lain:

- a. Penggunaan single data sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian.
- b. Pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Renstra (2021 – 2026) dilakukan dengan cara membandingkan realisasi per tahun masing-masing indikator kinerja sasaran, dan untuk 2022 ada 4 (empat) Sasaran yang dapat diukur yaitu :

1. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian.
2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian.
3. Meningkatnya Produksi Peternakan.
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani.



Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam *Tabel realisasi capaian kinerja SKPD tahun Renstra 2021-2026* berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
				2022	2022	2022
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Padi	Ton/Ha	3.62	3.77	104.14
		Jagung	Ton/Ha	5.55	5.35	96.40
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Padi	Ton	117,596.4	117,677.4	100.07
		Jagung	Ton	29,401	8,239.8	28.03
		Palawija (Porang)	Ton	250	0	0
		Hortikultura	Ton	106,539	89,957.73	84.44
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Daging	Kg	14,036,000	10,786,295	76.85
		Telur	Kg	1,594,000	3,820,404	239.67
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	98.37	Belum diliris oleh BPS	Belum diliris oleh BPS

*Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2021*

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		CAPAIAN		% CAPAIAN	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Padi	Ton/Ha	5.86	3.62	3.78	3.77	64.51	104.14
		Jagung	Ton/Ha	4.48	5.55	5.44	5.35	121.43	96.40
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Padi	Ton	279,096	117,596.4	118,552	117,677.4	42.48	100.07
		Jagung	Ton	30,486	29,401	5,646	8,239.8	18.52	28.03
		Palawija (Porang)	Ton	0	250	0	0	0	0
		Hortikultura	Ton	103,105	106,539	139,574	89,957.73	135.37	84.44
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Daging	Kg	0	14,036,000	13,491,456	10,786,295	0	76.85
		Telur	Kg	0	1,594,000	1,502,532	3,820,404	0	239.67
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	0	98.37	95.97	Belum diliris oleh BPS	0	Belum diliris oleh BPS



➤ **Analisis Kinerja Sasaran**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui **Tabel realisasi capaian kinerja** SKPD tahun Renstra 2021 – 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun hasil realisasi ini di evaluasi dengan ;

Kebijakan pemerintah dapat diambil secara tepat apabila berdasar pada informasi statistik yang akurat dan tepat waktu. Informasi tersebut selain menunjukkan perkembangan hasil pembangunan juga memperoleh masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Tujuan pembangunan daerah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam pembangunan ekonomi selalu muncul polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi realisasi dari variable yang diukur banyak dipengaruhi antara lain :

1. Kurangnya dukungan perencanaan akan anggaran
2. Kurangnya dukungan Staf terhadap Komitmen Pimpinan
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki
4. Keterbatasan Benih Bermutu
5. Penggunaan pupuk dan pestisida belum optimal
6. Ketersediaan alat mesin pertanian belum cukup
7. Penanganan pengendalian serangan OPT masih minim
8. Pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal
9. Intensitas pembinaan dan monitoring kegiatan lapangan belum optimal
10. Pemetaan wilayah komoditas prioritas belum jelas
11. Belum tersedia data dan informasi secara online



12. Masih Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara.
13. Sistem irigasi pertanian dan infrastruktur jalan usaha tani belum mampu mendukung untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil pertanian dan Peternakan secara memadai.
14. Kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan Peternakan khususnya lahan sawah ke sektor penggunaan lain.
15. Jalinan kerjasama kemitraan dan keterkaitan usaha di dalam internal sub sektor pertanian dan Peternakan maupun eksternal (dengan sub sektor/sektor lainnya) masih lemah serta pemasaran produk masih terbatas di tingkat lokal.
16. Semakin meningkatnya harapan & tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi menuju terwujudnya pelayanan bidang pertanian dan Peternakan yang mampu memuaskan masyarakat.
17. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
18. Faktor-faktor pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

#### ***Kesuburan Tanah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Pertanian***

Tanah (bahasa Yunani: *pedon*; bahasa Latin: *solum*) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang



baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Ilmu yang mempelajari berbagai aspek mengenai tanah dikenal sebagai ilmu tanah. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi, meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain.

Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Kesuburan tanah tergantung pada keseimbangan empat faktor yaitu air, oksigen, unsur hara, kondisi fisik dan unsur toksik (zat penghambat). Kelima faktor ini tidak boleh bertindak sebagai faktor pembatas yang keterlaluhan, karena akan mengakibatkan 'ke-optimuman' faktor-faktor yang lain jadi tidak bermanfaat lagi.

a. Air

Sekitar 500 gram air diperlukan untuk menghasilkan 1 gram bahan tumbuhan kering. Sekitar 5 gram atau 1 persen air ini menjadi bagian terpadu dari tumbuhan. Sisanya hilang melalui stomata pada daun selama penyerapan karbondioksida. Keadaan atmosfer seperti kelembaban dan suhu nisbi memainkan peran utama dalam menentukan seberapa cepat air itu hilang dan jumlah air yang diperlukan tumbuhan. Karena pada hakikatnya pertumbuhan semua tanaman pertanian akan dibatasi bila terjadi kekurangan air. Meskipun keadaannya mungkin sementara dan tanaman tidak dalam bahaya kematian, kemampuan tanah untuk menahan air terhadap gaya tarik bumi menjadi sangat penting kecuali jika air hujan atau irigasi mencukupi. Keperluan akan pembuangan kelebihan air dari tanah berkaitan dengan keperluan untuk oksigen.

Tanah yang subur akan memberikan kecukupan air yang seimbang bagi tanaman. Karena kekurangan maupun kelebihan, keduanya akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.



b. Oksigen

Oksigen mutlak di butuhkan untuk proses pembakaran fisiologis atau respirasi. Jika dalam pertumbuhannya akar kekurangan oksigen maka respirasi akan terganggu dan penyerapan bahan-bahan organik yang berasal dari tanah yang digunakan sebagai bahan dasar fotosintesis akan berkurang sehingga kesehatan tanaman pun akan menurun. Akar mempunyai lubang-lubang yang disebut lentisel yang memungkinkan pertukaran gas. Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel akar dan digunakan untuk pernafasan, sedangkan karbondioksida berdifusi ke dalam tanah. Pernafasan melepaskan energy yang diperlukan tanaman untuk sintesa dan translokasi senyawa-senyawa organik dan pengumpulan aktif ion-ion hara untuk melawan gradient konsentrasi.

c. Unsur-unsur hara yang Esensial

Unsur-unsur hara dalam tanah pun ikut berperan dalam menentukan kesuburan tanah. Paling sedikit ada 16 unsur yang kini dianggap perlu untuk pertumbuhan tanaman berpembuluh. Karbon, hydrogen dan oksigen yang digabungkan dalam rekasi fotosintesis, diperoleh dari udara dan air. Unsur-unsur ini menyusun 90 persen atau lebih bahan kering. 13 unsur sisanya, sebagian besar diperoleh dari tanah. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium dan belerang diperlukan dalam jumlah besar dan disebut unsur-unsur makro. Hara yang diperlukan dalam jumlah cukup kecil disebut unsur mikro atau perunut (trace element) dan meliputi mangan, besi, boron, seng, tembaga, molybdenum, dan klor. Kebanyakan hara terdapat dalam mineral dan bahan organik, dan dalam keadaan demikian tidak larut dan tidak tersedia bagi tumbuhan. Hara menjadi tersedia melalui pelapukan mineral dan penguraian bahan organik. Memang jarang tanah yang mampu menyediakan semua unsure penting selama jangka waktu yang panjang dalam jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang tinggi. Namun tanah yang subur akan memiliki sebagian besar unsure hara yang diperlukan oleh tanaman.



### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Peternakan**

Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima. Serta kurangnya pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

Selain narasi di atas, Indikasi yang dapat dianalisa terhadap kondisi komoditas yang diukur tersebut antara lain :

1. Peningkatan kesuburan tanah belum maksimal.
2. Penurunan luas tanam .
3. Alih fungsi lahan/konversi lahan.
4. Penurunan daya dukung tenaga kerja.
5. Anomali iklim.
6. Penurunan luas panen.
7. Teknologi budidaya yang tidak berubah.
8. Kurangnya Pengawasan yang berkualitas.
9. Trend permintaan pasar.
10. Khusus komoditi jagung pengaruh terbesarnya yaitu panen muda.
11. Keragaman agroklimat (terapan iklim dan topografi).
12. Penyediaan dan penyaluran ALSINTAN yang kurang tepat.
13. Optimalisasi lahan yang kurang.
14. Fasilitas penunjang pertanian (jalan usaha tani, irigasi) yang kurang.
15. Fasilitas pengolahan pasca panen yang kurang berkembang/pemanfaatannya masih rendah.
16. Belum meratanya penggunaan varietas unggul.
17. Bertambahnya keragaman komoditi yang dibudidayakan.
18. Tren pasar yang tinggi terhadap komoditi yang dibudidayakan.



19. Kurangnya pengalaman usaha, modal usaha jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.
20. tata ruang daerah untuk pengembangan komoditas peternakan yang difokuskan pada suatu lokasi atau wilayah secara terpadu belum sesuai dengan peruntukan.
21. Pembangunan Peternakan masih terkotak – kotak serta kurangnya koordinasi masyarakat (peternak, koperasi dan swasta) ke pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah
22. Belum fokusnya pembangunan Peternakan yang diarahkan untuk menumbuh-kembangkan ekonomi perdesaan yang mandiri.
23. Kurangnya pendayagunaan aparatur yang berkompeten, PPL dan/atau tenaga ahli dalam mengawal dan memfasilitasi pengembangan budidaya tanaman dan peternakan.
24. Masih rendahnya penerapan dan pengembangan paket teknologi yang sesuai dalam intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang didukung dengan pengembangan kemampuan SDM petani.



**Program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	Penghambat Capaian (Permasalahan)	Tindak Lanjut (Rekomendasi)
			(14)	(15)
(1)	(3)	(4)	(14)	(15)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Tanam Padi	1. Dampak Perubahan Iklim (Banjir/kekeringan) 2. Kesulitan mendapatkan solar bersubsidi 3. Alih Profesi Petani 4. Bantuan benih kurang	Normalisasi Jaringan Irigasi Rekomendasi akses pembelian solar subsidi Subsidi output Pemenuhan Bantuan Benih
		2. Luas Tanam Jagung	Keterbatasan pupuk bersubsidi	Penambahan kuota pupuk bersubsidi
		3. Luas Tanam Palawija (Porang)	Keterbatasan Anggaran	Penyesuaian anggaran
		4. Luas Tanam Hortikultura	Dampak Perubahan Iklim	Review Renstra
		5. Peningkatan Populasi Ternak Besar	Penyakit Ternak	percepatan penanganan dan penambahan tenaga medis
		6. Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Menurunnya jumlah Peternak Produktif	Peningkatan Pembinaan secara berkesinambungan kepada Peternak Pemula
		7. Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Adanya Perubahan Parameter perhitungan populasi unggas yang semula populasi pertahun dihitung secara akumulatif	Target disesuaikan parameter perhitungan yang berlaku saat ini
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Curah Hujan	Memprediksi bulan basah dan bulan kering saat pelaksanaan kegiatan
		2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Ketersediaan Lahan	Perlu koordinasi dengan pihak pemohon usulan kegiatan
		3. Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Keterbatasan Anggaran	Penyesuaian anggaran dengan target anggaran
		4. Jumlah DAM Parit yang dibangun	Kondisi Geografis dan Curah Hujan	Akurasi perhitungan dalam menyiapkan perencanaannya
		5. Jumlah Pintu Air yang dibangun	Curah Hujan	Memprediksi bulan basah dan bulan kering saat pelaksanaan kegiatan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak	terjadinya wabah penyakit pada ternak secara endemis	percepatan penanganan dan penambahan tenaga medis
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Keterlambatan pembayaran	Perlu perbaikan sistem pembayaran khususnya pada penunjang kegiatan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Keterbatasan pengurus kelompok tani dalam kelengkapan administrasi penilaian	Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan kenaikan kelas kemampuan kelompok tani



## **B. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 171.149.382.866,00 terealisasi sebesar Rp. 158.031.198.631,00 atau 92,34%. Realisasi anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



LAPORAN REALISASI KEGIATAN  
Tahun Anggaran 2022  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan	Keuangan	
		Rp	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148,192,333	128,854,174.00	86.95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35,000,000	23,995,000.00	68.56
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,000,000	139,243,400.00	99.46
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56,230,641,903	51,647,284,329.00	91.85
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360,000,000	320,950,000.00	89.15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48,437,000	47,641,000.00	98.36
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	163,393,276	163,375,000.00	99.99
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000	199,377,970.00	99.69
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16,231,000	16,231,000.00	100.00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47,076,700	47,050,000.00	99.94
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	448,914,027	436,792,957.00	97.30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	545,000,000	515,783,000.00	94.64
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,475,000	49,310,000.00	99.67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	24,750,000.00	99.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700,000,000	699,543,360.00	99.93
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65,424,000	64,795,000.00	99.04
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,300,000,000	1,236,374,642.00	95.11
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,991,000	1,989,000.00	99.90



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	754,084,564	681,318,216.00	90.35
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,832,000	95,832,000.00	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,420,850,028	4,283,431,432.00	96.89
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139,106,000	139,055,470.00	99.96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	698,570,000	633,454,122.00	90.68
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000	199,995,000.00	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,603,247,704	2,585,610,774.00	99.32
<b>PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			
<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>			
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	40,760,000,000	38,121,551,750.00	93.53
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	400,000,000	265,686,000.00	66.42
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>			
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5,370,000,000	5,159,746,184.00	96.08
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100,000,000	94,938,000.00	94.94
<b>PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			
<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	4,000,000,000	3,343,064,293.00	83.58
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	12,620,000,000	12,033,395,983.00	95.35
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	6,750,000,000	6,355,475,899.00	94.16
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18,508,731,331	16,971,583,487.00	91.70



Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1,900,000,000	1,177,262,698.00	61.96
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	2,650,000,000	2,360,930,728.00	89.09
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,470,000,000	1,410,434,807.00	95.95
<b>Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>			
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	260,000,000	255,391,876.00	98.23
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	650,000,000	630,562,009.00	97.01
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>			
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	900,000,000	662,300,081.00	73.59
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,484,900,000	1,371,179,137.00	92.34
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	525,000,000	384,155,000.00	73.17
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3,364,285,000	3,051,503,853.00	90.70
	<b>171,149,382,866.00</b>	<b>158,031,198,631.00</b>	<b>92.34</b>



**Adapun pada realisasi capaian per program dan kegiatan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :**

1. Dari pagu dana Rp 171,149,382,866,- terdapat :
  1. Kegiatan dengan sumber dana alokasi khusus (DAK FISIK) Rp 3.564.285.000,00.
  2. Kegiatan dengan sumber dana alokasi khusus (DAK NON FISIK) Rp 150.000.000,00.
  3. Kegiatan dengan sumber dana Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur (BanKeu) Rp 2.500.000.000,00.
2. Adapun narasi yang dapat dituangkan atas realisasi keuangan yang tercapai (92,34%) yaitu;
  - Persentase menyajikan perbandingan antara Pagu Anggaran yang tersedia dengan realisasi yang telah dicapai berupa satuan persen. Sehingga hasil persentase mampu menggambarkan predikat capaian sebagai berikut :

- 80 % – 100 %	= baik
- 50 % – 79 %	= Cukup
- < 50 %	= Kurang
  - Berdasarkan ilustrasi poin pertama maka dapat dikategorikan **Baik** untuk realisasi keuangan tahun anggaran 2021.



#### IV. PENUTUP

#### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Satuan
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	B	B	B	B	B	Nilai
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti	100	100	100	100	100	Persen
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Padi	3,62	3,79	3,96	4,16	4,39	Ton/Ha
		Jagung	5,56	5,81	6,08	6,38	6,74	Ton/Ha
3	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Padi	117.596,40	118.705,80	119.815,20	120.924,60	122.034	Ton
		Jagung	29.401	54.246	86.895	131.463	199.317	Ton
		Palawija (Porang)	250	385	540	715	910	Ton
		Hortikultura	106.539	108.303	110.119	112.008	113.96	Ton
4	Meningkatnya Produksi Peternakan	Daging	14.036.000	14.317.000	14.603.000	15.000.000	15.200.000	Kg
		Telur	1.594.000	1.641.000	1.691.000	1.741.000	1.794.000	Kg
5	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,37	101,07	104,11	107,44	111,09	Persen

Untuk capaian IKU yang melampaui target kiranya perlu terus dipacu peningkatannya disinergiskan dengan yang masih dibawah target melalui program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* sehingga mendorong capaian indikator utama lainnya. Sedangkan capaian indikator utama yang sesuai target perlu ditingkatkan agar lebih memberikan manfaat/dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Adapun capaian indikator utama yang masih dibawah target perlu mendapat perhatian yang lebih ekstra untuk pelaksanaan program/kegiatannya pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini membutuhkan komitmen dan kesungguhan dari seluruh pihak terkait guna suksesnya pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara ini dibuat yang merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Penyusunan



LKjIP 2022 ini masih belum sepenuhnya sempurna, dan hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
2. Dan seperti yang terdahulu untuk keseragaman dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan kegiatan workshop atau pelatihan oleh lembaga yang berkompeten sehingga terwujud LKjIP yang lebih baik.